Pengelolaan Harta dalam Perspektif Pengusaha UMKM Muslim di Kota Banjarmasin

Rijalul Faqih
rijal0164@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara pandang dan praktik pengelolaan harta oleh para pengusaha Muslim pelaku UMKM di Kota Banjarmasin berdasarkan nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi usaha, dan dokumentasi pendukung. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan verifikasi data, serta triangulasi sumber untuk validitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha Muslim memiliki pemahaman bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab, kejujuran, dan menghindari praktik haram seperti riba. Sebagian besar pelaku usaha telah menjalankan nilai-nilai dasar Islam seperti menunaikan zakat, menjaga niat ibadah dalam bisnis, dan berbagi melalui sedekah. Namun, pengelolaan keuangan masih bersifat informal, dengan pencatatan yang minim dan belum adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha. Nilai-nilai etika Islam seperti niat, amanah, tawakal, dan orientasi keberkahan menjadi landasan moral, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam aspek teknis manajerial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kesadaran normatif yang kuat terhadap nilai-nilai Islam, masih diperlukan edukasi, pendampingan, dan digitalisasi sederhana agar pengelolaan harta oleh pelaku UMKM Muslim lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan ekonomi syariah berbasis komunitas lokal.

Kata kunci: Pengelolaan harta, UMKM Muslim, ekonomi Islam, etika bisnis, Banjarmasin

Pendahuluan

Pengelolaan harta dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting, karena harta dipandang bukan semata-mata sebagai milik pribadi, melainkan sebagai amanah dari

Allah SWT. Dalam pandangan Islam, manusia hanya berperan sebagai khalifah dan pengelola harta yang telah dipercayakan kepadanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”* (QS. Al-Hadid: 7). Ayat ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan manusia atas harta bersifat terbatas dan fungsional. Manusia diberi kuasa atas harta bukan untuk menumpuk atau memperkaya diri semata, tetapi untuk dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebermanfaatn sosial (Al-Maududi, 1984).

Dalam konteks tanggung jawab tersebut, Islam sangat menekankan prinsip amanah. Harta yang dimiliki harus dicari dengan cara yang halal, dikelola dengan cermat, dan dibelanjakan pada hal-hal yang diperbolehkan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda: *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini tidak hanya mencakup kepemimpinan dalam arti sosial dan politik, tetapi juga tanggung jawab dalam mengelola aset dan sumber daya ekonomi.

Pengusaha Muslim khususnya yang mengelola usaha UMKM memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat karena mereka bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen moral dan sosial dalam masyarakat. Dalam Islam, kegiatan usaha (*tijarah*) merupakan salah satu profesi yang sangat dihargai, bahkan Rasulullah ﷺ sendiri adalah seorang pebisnis sebelum diutus menjadi Nabi. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah, selama dijalankan dengan cara yang halal, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda: *“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada”* (HR. Tirmidzi no. 1209). Ini menunjukkan bahwa pengusaha yang menjalankan perannya dengan benar memiliki kedudukan mulia di sisi Allah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengusaha Muslim di wilayah dengan basis keislaman yang kuat memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan, seperti zakat, larangan riba, penghindaran israf, serta komitmen terhadap keberkahan harta. Dengan demikian, Banjarmasin bukan hanya menarik dari sisi geografis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosioreligius, yang memungkinkan penelitian tentang pengelolaan harta oleh pengusaha Muslim khususnya yang mengelola UMKM dilakukan secara kontekstual, mendalam, dan bermakna. Kehadiran institusi keuangan syariah, koperasi Islami, serta tren dakwah kewirausahaan juga memperkuat argumen bahwa Banjarmasin merupakan laboratorium sosial yang ideal untuk mengkaji hubungan antara agama dan praktik ekonomi umat.

Meskipun kajian mengenai ekonomi Islam, pengelolaan harta, dan etika bisnis syariah telah banyak dibahas dalam literatur, sebagian besar penelitian tersebut cenderung bersifat normatif dan konseptual. Fokus utamanya berkisar pada prinsip-prinsip ideal pengelolaan harta menurut syariah, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan konsep

keberkahan dalam rezeki. Namun, belum banyak studi yang secara spesifik menelusuri bagaimana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik oleh pengusaha Muslim lokal, khususnya yang berada di wilayah dengan kekhasan budaya dan karakter sosial tertentu, seperti Kota Banjarmasin. Padahal, dalam konteks ekonomi umat, praktik pengelolaan harta oleh para pelaku usaha kecil dan menengah memainkan peran penting dalam membentuk pola distribusi kekayaan, keberkahan ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara nyata.

Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan harta oleh pengusaha Muslim di Banjarmasin menjadi signifikan, karena mampu mengisi kekosongan literatur (research gap) yang ada, serta memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dihidupkan atau justru mengalami tantangan dalam praktik ekonomi masyarakat Muslim lokal. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan kebijakan dan pendidikan ekonomi Islam berbasis realitas lapangan.

Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

1. Konsep Harta dalam Islam

Dalam Islam, harta (*al-māl*) memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari nikmat Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Konsep harta dalam Islam tidak sekadar dipandang sebagai alat tukar atau akumulasi kekayaan, melainkan sebagai amanah (titipan) dari Allah yang penggunaannya akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan kepemilikan nisbi yang bersifat fungsional: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..." (QS. Al-Hadid: 7). Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kuasa atas harta bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk dikelola sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan.

Dalam perspektif fikih muamalah, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat secara sah menurut syariah dan dapat dimiliki serta dipindahtangankan (Al-Zuhayli, 2003). Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam harus bersumber dari cara yang halal, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Islam juga mengatur kewajiban mendistribusikan harta melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Dengan kata lain, Islam tidak menganjurkan akumulasi kekayaan yang stagnan, tetapi mengarahkan agar harta berputar dan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat luas (Chapra, 2000).

Lebih jauh, Islam menekankan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, tetapi sarana untuk meraih ridha Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ disebutkan: "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang hartanya: dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan" (HR. Tirmidzi no. 2417). Hadis ini memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan harta harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, etika, dan tanggung jawab moral. Maka, pemahaman yang utuh tentang

konsep harta dalam Islam menjadi fondasi penting dalam membangun perilaku ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan bernilai ibadah.

a. Makna harta menurut al-Qur'an dan hadis.

Islam memandang bahwa harta (*al-māl*) merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan nilai-nilai keimanan. Al-Qur'an mengakui keberadaan harta sebagai sarana penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus ujian bagi manusia dalam mengelola nikmat yang Allah titipkan. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah-lah pahala yang besar" (QS. At-Taghabun: 15). Ayat ini menegaskan bahwa harta bukan semata-mata objek ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual. Dalam ayat lain, harta disebut sebagai *qiyām* (penopang kehidupan) sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 5: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu), yang Allah telah menjadikannya sebagai penopang kehidupan (*qiyām*) kalian...", yang menunjukkan bahwa fungsi harta dalam Islam bukan untuk ditumpuk, tetapi dikelola secara produktif dan maslahat.

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ juga memperkuat makna bahwa harta adalah amanah yang harus dicari dengan cara yang halal dan dibelanjakan pada hal-hal yang diridhai Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan: "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya... tentang hartanya: dari mana ia mendapatkannya dan ke mana ia membelanjakannya" (HR. Tirmidzi no. 2417). Hadis ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta tidak lepas dari akuntabilitas di hadapan Allah. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur aspek legal dalam kepemilikan harta, tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral terhadap sumber, pemanfaatan, dan tujuan akhir dari harta tersebut.

Makna harta dalam Islam bersifat multidimensi: selain sebagai alat pemenuhan kebutuhan (*instrumental*), juga sebagai amanah (*trust*), ujian (*fitnah*), dan sarana ibadah (*wasilah*). Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din menjelaskan bahwa harta adalah nikmat yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan jika digunakan secara benar, namun juga dapat menjerumuskan apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, konsep harta dalam Islam berada dalam kerangka nilai yang memadukan antara kepemilikan individu, tanggung jawab sosial, dan keberkahan spiritual. Dengan pemahaman ini, pengelolaan harta tidak dapat dilepaskan dari orientasi akhirat dan peran sosial dalam masyarakat.

b. **Konsep kepemilikan, tanggung jawab sosial, dan zakat.**

Konsep kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan amanah, bukan absolut sebagaimana dalam pandangan kapitalistik. Al-Qur'an menegaskan bahwa hakikat kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebagai pengelola (*khalifah*) yang diberi wewenang terbatas atas harta. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah: "Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pengelolanya..." (QS. Al-Hadid: 7). Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk harta yang dimiliki seseorang sejatinya adalah titipan, yang penggunaannya akan dimintai

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek etika, keadilan, dan kebermanfaatn sosial.

Konsep ini berimplikasi langsung pada tanggung jawab sosial pemilik harta. Dalam Islam, tidak diperbolehkan adanya penumpukan kekayaan tanpa distribusi yang adil, karena hal tersebut dapat melahirkan kesenjangan dan kerusakan sosial. Kepemilikan pribadi wajib dibarengi dengan kewajiban sosial, salah satunya melalui mekanisme zakat. Zakat adalah rukun Islam yang kelima, sekaligus sistem distribusi kekayaan yang berfungsi mengalirkan sebagian harta dari yang kaya kepada yang membutuhkan. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah: 60 mengenai delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat, yang mencerminkan sistem keuangan yang tidak hanya spiritual, tetapi juga solutif terhadap persoalan ekonomi.

Zakat dalam ekonomi Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga merupakan instrumen fiskal yang berperan dalam mengurangi kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, dan menjaga sirkulasi harta secara berkelanjutan. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyebut zakat sebagai pilar keseimbangan sosial yang dapat menstabilkan perekonomian masyarakat. Demikian pula, Al-Ghazali menekankan bahwa kekayaan yang tidak disalurkan melalui zakat dan sedekah justru menjadi penyebab kerusakan spiritual dan sosial. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam mengandung dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia), dan zakat menjadi bukti konkrit dari integrasi antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta.

2. Etika Bisnis dan Pengelolaan Keuangan Syariah:

Etika bisnis dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi syariah yang menekankan nilai kejujuran (ṣidiq), keadilan (‘adālah), amanah, serta larangan terhadap penipuan (gharar) dan riba. Prinsip-prinsip ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam tidak terlepas dari konsep pengelolaan keuangan syariah, di mana semua transaksi harus dilakukan secara transparan, bebas dari unsur haram, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188), ayat ini menegaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang tidak etis, meskipun secara formal tampak legal.

Dalam pengelolaan keuangan syariah, pelaku usaha Muslim dituntut untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan investasi berdasarkan prinsip halal dan thayyib. Ini mencakup keharusan menghindari transaksi yang bersifat spekulatif (maysir), serta menerapkan prinsip pencatatan yang jujur dan akuntabel. Selain itu, dalam praktik kontemporer, banyak pelaku usaha yang menerapkan prinsip keuangan syariah melalui instrumen seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, dan akad-akad syariah lainnya untuk mendukung kegiatan usaha. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan bukan hanya aspek teknis, melainkan juga dimensi spiritual

yang menyatu dengan akhlak bisnis. Etika bisnis dan sistem keuangan syariah pada akhirnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung dalam koridor keberkahan dan tanggung jawab moral kepada Allah dan sesama manusia (Lihat: Wahbah al-Zuhayli, 2003).¹

a. Prinsip Halal-Haram, Tabzir-Israf, dan Transparansi.

Prinsip halal dan haram merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam, termasuk dalam pengelolaan harta dan aktivitas bisnis. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari dan membelanjakan harta hanya melalui jalan yang halal, yakni sesuai dengan ketentuan syariah, serta menjauhi segala bentuk transaksi haram seperti riba, maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), serta barang dan jasa yang dilarang secara syar'ī (QS. Al-Baqarah: 275). Kepatuhan terhadap prinsip ini bukan hanya sebagai aspek legal, tetapi juga merupakan bentuk ketakwaan dan pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT. Dalam hadis disebutkan: “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima keculai yang baik (halal)” (HR. Muslim no. 1015), yang menegaskan bahwa keberkahan harta sangat terkait dengan kehalalannya.

Selain halal-haram, Islam juga mengatur bagaimana harta dibelanjakan secara bijak dan tidak berlebih-lebihan. Dalam hal ini, terdapat larangan terhadap tabzīr (pemborosan untuk hal yang sia-sia) dan isrāf (berlebih dalam hal yang sebenarnya dibolehkan). Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang memboroskan (harta) itu adalah saudara-saudara setan” (QS. Al-Isra': 27). Prinsip ini mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam konsumsi dan pengeluaran, serta membentuk sikap hidup sederhana yang menjauhkan umat dari gaya hidup konsumtif yang merusak spiritualitas dan ketahanan ekonomi keluarga.

Prinsip ketiga yang menjadi karakter keuangan Islami adalah transparansi (amanah dan kejelasan dalam transaksi). Islam sangat menekankan pencatatan dan kesepakatan yang jelas dalam setiap akad, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang pentingnya pencatatan utang-piutang dan transaksi. Dalam konteks bisnis modern, transparansi berarti menyediakan informasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam laporan keuangan, kontrak kerja sama, serta komunikasi dengan konsumen. Ketiga prinsip ini—halal-haram, tabzīr-isrāf, dan transparansi—merupakan satu kesatuan nilai yang membentuk karakter ekonomi Islam yang tidak hanya etis dan efisien, tetapi juga bertujuan membangun tatanan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berkeadaban.

b. Distribusi harta dalam ekonomi Islam.

Distribusi harta merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menekankan kepemilikan dan akumulasi individu, Islam menempatkan prinsip distribusi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara hak kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, Islam memperkenalkan berbagai instrumen distribusi harta, seperti

zakat, infak, sedekah, hibah, waris, dan wakaf. Masing-masing instrumen memiliki peran spesifik dalam mengalirkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, tanpa menafikan hak milik individu.

Zakat, misalnya, diwajibkan atas harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, dan harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak (asnaf), sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60. Sementara wakaf menjadi bentuk distribusi bersifat abadi dan produktif yang mendukung pembangunan sarana umum seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sistem warisan (faraidh) pun diatur dengan jelas agar tidak terjadi konsentrasi harta dalam satu tangan, melainkan tersebar secara proporsional di antara ahli waris. Dalam konteks ini, distribusi harta dalam Islam bukan sekadar amal kebajikan, melainkan bagian dari sistem ekonomi yang dirancang untuk menjamin keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi umat. Seperti dijelaskan oleh M. Umer Chapra (2000), distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bersifat vertikal (dari kaya ke miskin), tetapi juga horizontal, dalam bentuk kerja sama produktif antarpelaku ekonomi berbasis nilai syariah.

3. Studi Terdahulu:

a. Penelitian tentang pengusaha muslim di kota lain (perbandingan).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas aspek pengelolaan harta dan etika ekonomi dalam Islam, baik dari sisi normatif maupun implementatif. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rofiq (2020) berjudul “Manajemen Harta dalam Perspektif Islam” menyimpulkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus berorientasi pada keberkahan, dengan prinsip amanah, halal-haram, dan adanya keseimbangan antara konsumsi, investasi, dan distribusi. Studi tersebut masih bersifat konseptual dan belum mengaitkan langsung dengan praktik pelaku usaha. Sementara itu, Nurkholis (2018) dalam artikelnya “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” menyoroti efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian mustahik, namun fokus utamanya adalah pada lembaga amil dan penerima zakat, bukan pada sudut pandang muzakki atau pelaku usaha.

Selanjutnya, penelitian oleh Azizah (2021) yang mengkaji “Etika Bisnis Islam pada Praktik UMKM di Kota Surabaya” menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM Muslim telah menerapkan prinsip kejujuran, larangan riba, dan tanggung jawab sosial, meskipun belum terdokumentasi secara sistematis dalam pengelolaan keuangannya. Studi ini memberikan pijakan penting bahwa pelaku usaha Muslim memiliki kesadaran religius yang tinggi, namun masih minim dalam aspek perencanaan keuangan dan dokumentasi. Dalam konteks lokal, belum banyak studi yang secara khusus menelusuri praktik aktual pengelolaan harta oleh pengusaha Muslim di kota-kota berbasis dagang seperti Banjarmasin, terutama yang mempertemukan antara nilai normatif Islam dan realitas ekonomi urban. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (research gap) dalam kajian literatur yang ada, khususnya dengan pendekatan studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap pelaku usaha lokal yang beridentitas Muslim

Penelitian mengenai pengelolaan harta dalam perspektif pengusaha Muslim juga pernah dilakukan di beberapa kota lain, salah satunya oleh Fauziyah (2022) yang mengkaji praktik etika bisnis dan pengelolaan keuangan syariah di kalangan pedagang Muslim di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah seperti kejujuran dalam jual beli, menghindari riba, dan menjaga amanah terhadap konsumen. Namun, praktik pencatatan keuangan dan distribusi harta secara sistematis seperti zakat atau sedekah masih dilakukan secara informal dan kurang terdokumentasi. Selain itu, aspek spiritual sering kali menjadi pendorong utama keputusan bisnis, seperti memilih bahan baku halal meskipun harganya lebih mahal, atau menolak pinjaman berbunga meskipun dibutuhkan untuk ekspansi usaha.

Konteks Yogyakarta sebagai kota dengan kombinasi identitas budaya dan religiusitas tinggi menjadikan studi tersebut relevan untuk dijadikan pembandingan. Akan tetapi, karakteristik kota dagang seperti Banjarmasin yang memiliki basis komunitas Muslim kuat dan sejarah panjang dalam perdagangan lintas pulau menghadirkan konteks yang berbeda, terutama dalam dinamika pengelolaan harta oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian di Banjarmasin menjadi penting untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai Islam tidak hanya diyakini secara normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam realitas ekonomi lokal yang khas. Dengan membandingkan hasil penelitian dari kota lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis yang lebih kontekstual terhadap studi manajemen harta dan etika bisnis syariah di Indonesia.

Tabel Perbandingan Studi Terdahulu dan Posisi Penelitian

Peneliti	Fokus Penelitian	Metodologi	Kelemahan / Gap
Sari & Rofiq (2020)	Manajemen harta secara konseptual dalam Islam	Studi kepustakaan (konseptual)	Tidak menyentuh aspek praktis pelaku usaha
Nurkholis (2018)	Zakat produktif dan pemberdayaan mustahik	Kualitatif, studi kasus lembaga zakat	Tidak fokus pada pelaku usaha atau muzakki
Azizah (2021)	Etika bisnis Islam pada praktik UMKM di Surabaya	Kualitatif, observasi dan wawancara UMKM	Belum eksplisit mengkaji pengelolaan harta
Fauziyah (2022)	Pengelolaan harta & etika bisnis pengusaha Muslim di Yogyakarta	Kualitatif, wawancara pengusaha Muslim pasar tradisional	Fokus di Yogyakarta, belum mengkaji dinamika kota dagang seperti Banjarmasin
Penelitian Ini	Pengelolaan harta oleh pengusaha Muslim lokal di Banjarmasin	Kualitatif, wawancara pengusaha Muslim Banjarmasin	Mengisi gap antara nilai normatif dan praktik aktual, khususnya di kota dagang

a. Manajemen Harta di Kalangan Individu Muslim

Kajian mengenai manajemen harta dalam perspektif Islam tidak hanya dilakukan pada skala kelembagaan atau usaha, tetapi juga telah banyak diteliti dalam konteks individu Muslim. Salah satunya adalah penelitian oleh Fatimah (2019) yang berjudul "Persepsi Individu Muslim terhadap Manajemen Keuangan Islami di Kalangan Pekerja Urban", yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah cukup memengaruhi perilaku keuangan individu, termasuk dalam perencanaan pengeluaran, investasi halal, dan pembayaran zakat. Studi ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar responden memahami konsep dasar seperti halal-haram dan pentingnya sedekah, namun praktik pencatatan dan pengelolaan jangka panjang seperti dana darurat atau warisan syariah masih minim dilakukan. Sementara itu, hasil studi Maulana & Rahmah (2021) menggarisbawahi bahwa orientasi religiusitas memiliki korelasi positif dengan keputusan pengelolaan harta secara syariah, termasuk dalam menghindari utang konsumtif, mengalokasikan dana untuk infak, dan penggunaan produk keuangan Islam.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada kelompok pekerja urban, mahasiswa, atau kelas menengah Muslim secara umum, tanpa membedakan peran sosial atau profesi mereka secara spesifik. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang luas untuk meneliti bagaimana praktik manajemen harta dijalankan oleh individu-individu Muslim yang memiliki peran sebagai pelaku usaha, khususnya di kota-kota yang menjadi pusat perdagangan umat Islam seperti Banjarmasin. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menggali secara lebih mendalam pengalaman nyata para pengusaha Muslim dalam mengelola harta, menginternalisasi nilai-nilai syariah, dan merespons tantangan ekonomi kontemporer dalam konteks lokal.

Topik pengelolaan harta dan etika keuangan syariah telah menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian yang mengkaji baik perilaku individu Muslim maupun praktik pelaku usaha. Penelitian oleh Hasanah dan Nurhayati (2020) berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pengelolaan Keuangan Pedagang Pasar Tradisional" menemukan bahwa meskipun banyak pedagang Muslim di pasar tradisional yang belum secara formal mengelola keuangan mereka, namun nilai-nilai kejujuran, amanah, dan menjauhi riba tetap menjadi prinsip utama dalam aktivitas bisnis mereka. Dalam konteks berbeda, studi oleh Rahman (2022) mengenai "Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengelola Pendapatan Rumah Tangga secara Islami" menekankan pentingnya kesadaran spiritual dalam mengatur pengeluaran, termasuk kewajiban zakat dan keengganan untuk berhutang konsumtif. Penelitian ini mengungkap bahwa ada hubungan erat antara nilai-nilai religius dan perilaku keuangan, meskipun belum semua individu Muslim memiliki kemampuan manajerial keuangan yang memadai.

Dari sisi kelembagaan, studi oleh Nuraini (2021) yang mengangkat tema "Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kinerja UMKM Berbasis Syariah di Jawa Barat" menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam—seperti keadilan harga, jujur dalam promosi, dan tidak melakukan penipuan—berkontribusi terhadap loyalitas pelanggan dan keberlanjutan usaha. Namun demikian, studi-studi tersebut umumnya masih terfokus pada wilayah Jawa atau kota-kota besar dengan karakter UMKM yang

lebih formal. Dengan demikian, penelitian mengenai pengusaha Muslim di Banjarmasin, yang merupakan kota dagang dengan karakter sosial budaya keislaman kuat namun bercorak heterogen, masih sangat terbatas. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi praktik aktual pengelolaan harta oleh pelaku usaha Muslim lokal sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks yang lebih kontekstual dan khas secara geografis maupun sosial.

Kerangka Teori

1. Teori Ekonomi Islam: Maqashid Syariah (hifzh maal), Fiqh Muamalah

a. Maqashid Syariah: Hifzh al-Māl (Perlindungan Harta)

Dalam kerangka ekonomi Islam, tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu dari lima tujuan utama maqashid adalah *hifzh al-māl* atau perlindungan terhadap harta. Konsep ini tidak hanya mengacu pada keamanan fisik harta, tetapi juga mencakup cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikannya secara halal dan adil. Harta dipandang sebagai titipan dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, Islam memberikan rambu-rambu yang ketat mengenai cara perolehan harta, seperti larangan riba, gharar, penipuan, serta perintah untuk menunaikan zakat dan sedekah sebagai bentuk penyucian dan distribusi kekayaan (al-Zuhayli, 2003).

Perlindungan terhadap harta juga bermakna bahwa individu wajib menghindarkan dirinya dari praktik pemborosan (*tabzīr*) dan sikap berlebih-lebihan (*isrāf*), sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isrā’: 26–27. Implementasi *hifzh al-māl* ini tidak terpisah dari tujuan syariah lainnya seperti perlindungan agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*), karena kelima unsur ini saling terhubung dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan berkelanjutan.

b. Fikih Muamalah sebagai Pedoman Ekonomi

Fikih muamalah adalah cabang fikih yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam ranah ekonomi dan sosial. Dalam konteks pengelolaan harta, fikih muamalah mencakup aturan tentang kepemilikan, akad (kontrak), jual beli, sewa, pinjam-meminjam, investasi, dan distribusi harta melalui zakat, hibah, waris, dan wakaf. Prinsip utama dalam muamalah adalah kebolehan (*ibahah*) selama tidak ada dalil yang melarang, sebagaimana kaidah “*al-aṣlu fī al-mu‘āmalāt al-ibāhah illa mā dalla al-dalīl ‘alā tahrīmihi*” (Asas muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang).

Fikih muamalah menekankan nilai-nilai keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan saling ridha (tarādī), sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 29: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.*" Ayat ini menjadi fondasi etika transaksi dalam Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi, manipulasi harga, atau kecurangan dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, fikih muamalah tidak hanya bertujuan mengatur transaksi agar sah secara syar'i, tetapi juga menjamin keadilan ekonomi dan keberkahan dalam praktik bisnis.

c. Integrasi Maqashid dan Muamalah dalam Pengelolaan Harta

Integrasi antara maqashid syariah, khususnya *hifzh al-māl*, dan fikih muamalah menciptakan kerangka teoretis yang kokoh dalam pengelolaan harta secara Islami. Di satu sisi, maqashid memberikan arah normatif dan tujuan etik, sedangkan muamalah menyediakan aturan teknis-operasional dalam praktik ekonomi. Dalam kehidupan pengusaha Muslim, keduanya menjadi acuan dalam menjalankan usaha: mulai dari memilih sumber pendanaan yang halal, menyusun kontrak yang adil, hingga menyalurkan sebagian keuntungan untuk kepentingan sosial seperti zakat dan wakaf. Hal ini mencerminkan pendekatan Islam yang holistik dalam mengelola harta, tidak hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada keberkahan, keseimbangan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

2. Teori Perilaku Keuangan Islami (Behavioral Islamic Finance)

a. Konsep Dasar Perilaku Keuangan dalam Perspektif Islam

Perilaku keuangan (behavioral finance) merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh faktor psikologis, sosial, dan emosional dalam pengambilan keputusan keuangan individu maupun kelompok. Dalam kerangka Islam, konsep ini berkembang menjadi Behavioral Islamic Finance (BIF), yaitu studi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan analisis perilaku keuangan. BIF berangkat dari asumsi bahwa keputusan keuangan seorang Muslim tidak hanya didasarkan pada rasionalitas ekonomi konvensional (homo economicus), tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai religius seperti niat (niyyah), takwa, tawakal, serta kepatuhan terhadap hukum halal-haram. Dengan demikian, perilaku keuangan Islami mengarahkan individu untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek spiritual dan sosial (Abdullah & Chew, 2010).

b. Faktor Psikologis dan Spiritual dalam Keuangan Muslim

Beberapa studi dalam BIF menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi terhadap keberkahan, ketakutan terhadap riba, dan motivasi berinfak memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pengeluaran, tabungan, dan investasi umat Muslim. Individu Muslim cenderung menghindari instrumen keuangan yang mengandung ketidakjelasan (gharar) atau spekulasi (maysir), meskipun instrumen tersebut menawarkan keuntungan lebih besar. Sebaliknya, mereka lebih memilih investasi yang jelas, halal, dan berkontribusi pada kemaslahatan sosial. Ini menunjukkan bahwa orientasi perilaku keuangan tidak netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh kerangka

nilai yang dianut, di mana dalam Islam nilai tersebut bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.

c. Implikasi Teori BIF terhadap Pengelolaan Harta

Dalam praktik pengelolaan harta, teori perilaku keuangan Islami mengimplikasikan bahwa seorang Muslim harus mampu mengelola hartanya secara bijak, dengan menahan diri dari sikap konsumtif dan berlebih-lebihan (*israf*), serta memiliki kesadaran untuk berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya *hifzh al-māl*, yang menekankan perlindungan dan kebermanfaatan harta. Dalam konteks pengusaha Muslim, penerapan teori ini berarti keputusan bisnis mereka tidak hanya diukur dari profitabilitas semata, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami aspek perilaku keuangan Islami, maka sistem ekonomi Islam tidak hanya menjadi sistem normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika psikologis dan budaya masyarakat Muslim.

4. Teori Nilai dan Etika Islam dalam Pengelolaan Harta

Etika dalam Islam tidak hanya menjadi pedoman moral individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertumpu pada keselarasan antara dimensi spiritual dan sosial. Dalam konteks ini, teori nilai dan etika Islam mencakup prinsip-prinsip utama seperti niat (*intention*), amanah (*tanggung jawab*), tawakal (*kepercayaan pada ketentuan Allah*), dan barakah (*keberkahan*). Nilai-nilai tersebut bukan hanya bersifat abstrak, tetapi menjadi fondasi dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan dan distribusi harta.

a. Niat (Niyah) sebagai Pondasi Moral

Dalam Islam, setiap amal dinilai berdasarkan niatnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam pengelolaan harta, niat yang ikhlas dan lurus menjadi syarat utama agar aktivitas ekonomi tidak sekadar menjadi sarana material, tetapi juga ibadah. Seorang pengusaha Muslim yang mengelola hartanya dengan niat untuk memberi manfaat kepada orang lain akan mendapatkan nilai spiritual dari usahanya, berbeda dengan sekadar orientasi keuntungan duniawi.

b. Amanah dan Tanggung Jawab Keuangan

Amanah dalam pengelolaan harta mencakup tanggung jawab terhadap sumber daya yang dimiliki—baik milik pribadi, publik, maupun lembaga. Konsep ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Pelanggaran terhadap amanah dalam ekonomi, seperti korupsi, manipulasi, atau penipuan, tidak hanya dianggap pelanggaran hukum, tetapi juga dosa dalam pandangan syariah (QS. Al-Anfal: 27).

c. Tawakal sebagai Sikap Mental dalam Risiko

Tawakal berarti menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Dalam aktivitas bisnis dan pengelolaan keuangan, prinsip tawakal menumbuhkan ketenangan batin dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, sekaligus mencegah sikap tergesa-gesa atau spekulatif yang berlebihan. Tawakal juga menjadikan pelaku ekonomi lebih bertanggung jawab dan tidak mudah terjebak dalam eksploitasi atau praktik merugikan pihak lain.

d. Barakah sebagai Tujuan Nilai

Berbeda dengan konsep keuntungan material dalam ekonomi konvensional, Islam memperkenalkan konsep barakah—yakni nilai tambah yang bersifat spiritual dan keberlanjutan sosial. Barakah tidak selalu berarti kuantitas, melainkan kualitas rezeki yang membawa kebaikan, ketenangan, dan manfaat luas. Dalam praktik pengelolaan harta, orientasi pada barakah menjadikan pelaku usaha lebih peduli pada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan pengusaha UMKM Muslim di Banjarmasin terhadap harta menurut Islam?
2. Bagaimana pengusaha UMKM muslim dalam praktik pengelolaan harta dalam kehidupan dan bisnis?
3. Apa saja prinsip-prinsip syariah yang mereka implementasikan dan abaikan?
4. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pola pengelolaan harta tersebut?

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan harta oleh pengusaha Muslim di Kota Banjarmasin dalam konteks nilai-nilai Islam. Jenis penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan pengalaman subjektif dari para narasumber, serta menganalisis fenomena sosial secara holistik dan kontekstual. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan dan menafsirkan praktik ekonomi umat berdasarkan perspektif pelaku usaha sendiri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field study) melalui wawancara mendalam. Studi lapangan memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan objek penelitian di lingkungan aslinya, sehingga diperoleh data yang kontekstual, naturalistik, dan autentik. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif dari pengusaha Muslim mengenai bagaimana mereka memandang, mengelola, dan mendistribusikan harta berdasarkan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, zakat, serta keberkahan. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan praktik mereka secara naratif dan reflektif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara Semi-Terstruktur
Wawancara dilakukan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi topik secara lebih dalam dan adaptif sesuai dengan dinamika percakapan. Informan utama terdiri dari para pengusaha Muslim yang menjalankan usaha mikro, kecil, atau menengah di Banjarmasin, dengan berbagai latar belakang sektor usaha.
- b. Observasi Langsung

Jika memungkinkan, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh informan, untuk memperoleh gambaran faktual mengenai tata kelola keuangan, lingkungan kerja, serta interaksi sosial ekonomi yang berlangsung.

- c. Studi Dokumentasi
Dokumentasi usaha seperti catatan keuangan, laporan usaha, bukti transaksi, atau dokumen zakat (jika tersedia) juga dikaji untuk memperkuat data dan mendalami aspek administratif dari pengelolaan harta.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

- a. **Reduksi Data:** Proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah dari wawancara dan observasi ke dalam kategori yang relevan.
- b. **Penyajian Data:** Menyusun data ke dalam bentuk narasi tematik atau matriks deskriptif untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
- c. **Verifikasi Data:** Menarik kesimpulan sementara dan menguji kebenarannya secara berulang melalui penelusuran data baru atau perbandingan antar data.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh kejelasan dan konsistensi informasi. Validasi juga dilakukan melalui konfirmasi kepada informan (member check) atas interpretasi yang dibuat oleh peneliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Pengusaha UMKM Muslim terhadap Konsep Harta dalam Islam

Sebagian besar informan dalam penelitian ini menunjukkan pemahaman bahwa harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Mereka memahami bahwa kepemilikan harta bersifat nisbi dan fungsional, bukan absolut. Beberapa pengusaha bahkan menyebutkan bahwa harta bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Hadid: 7 dan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa setiap hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya. Dalam praktiknya, pandangan ini mendorong pelaku usaha untuk berhati-hati dalam mencari rezeki dan menghindari cara yang haram. Namun, kedalaman pemahaman ini berbeda-beda antara satu pelaku usaha dengan lainnya, tergantung tingkat pendidikan agama, pengalaman usaha, dan lingkungan sosial.

2. Praktik Pengelolaan Harta dalam Aktivitas Usaha dan Kehidupan

Secara umum, pengusaha Muslim di Banjarmasin menunjukkan praktik pengelolaan harta yang cukup baik, terutama dalam hal pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pengendalian pengeluaran, serta pengalokasian dana untuk kebutuhan sosial seperti

zakat dan sedekah. Sebagian pelaku UMKM telah memiliki sistem pencatatan sederhana, meskipun belum terstandarisasi secara formal. Dalam wawancara, beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa mereka tidak mencatat secara rinci karena merasa masih skala kecil, namun tetap berusaha menjaga kejujuran dan keterbukaan. Pengeluaran yang bersifat konsumtif juga ditekan seminimal mungkin dengan prinsip hemat dan sederhana, sesuai nilai israf dan tabzir dalam Islam. Dalam beberapa kasus, pengelolaan harta juga disesuaikan dengan siklus usaha, seperti musim panen atau momen ramai pembeli.

3. Implementasi dan Pengabaian Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan sumber usaha, amanah, larangan riba, dan keharusan menunaikan zakat cukup banyak dijaga oleh informan. Mayoritas informan menolak praktik riba dan lebih memilih pinjaman dari lembaga keuangan syariah, koperasi, atau menggunakan modal pribadi. Zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian dari rutinitas keuangan mereka, meskipun dalam bentuk yang tidak selalu terdokumentasi. Namun, ada pula sebagian pelaku usaha yang belum menunaikan zakat secara tepat karena ketidaktahuan tentang hitungannya atau karena usaha belum dianggap stabil. Transparansi dan pencatatan keuangan juga menjadi tantangan, terutama bagi usaha mikro. Dalam hal ini, ditemukan adanya jarak antara prinsip ideal dan implementasi faktual.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pola Pengelolaan Harta

Beberapa faktor utama yang memengaruhi cara pengusaha Muslim mengelola hartanya antara lain adalah: (a) tingkat pemahaman agama, (b) pengalaman dan pendidikan bisnis, (c) lingkungan sosial (terutama komunitas masjid atau pengajian), serta (d) akses terhadap lembaga keuangan syariah. Bagi mereka yang aktif dalam lingkungan keagamaan, nilai-nilai Islam lebih kuat memengaruhi perilaku keuangan mereka, termasuk semangat berbagi dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Sebaliknya, bagi pelaku usaha yang fokus

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap para pengusaha UMKM Muslim di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pandangan terhadap Harta dalam Islam

Sebagian besar pengusaha Muslim memandang bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara halal, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebermanfaatannya. Mereka memahami bahwa harta bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial, yang

akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pandangan ini menjadi dasar moral dalam aktivitas bisnis mereka.

2. Praktik Pengelolaan Harta

Dalam praktiknya, para pengusaha cenderung menghindari riba, berupaya menjaga kejujuran, dan sebagian telah menunaikan zakat usaha atau sedekah secara rutin. Namun demikian, pencatatan keuangan dan pengelolaan harta secara sistematis masih belum berjalan optimal. Banyak di antara mereka mengelola keuangan secara informal tanpa pemisahan jelas antara harta pribadi dan usaha.

3. Implementasi Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah seperti halal-haram, amanah, dan keberkahan cukup dikenal dan dijalankan secara nilai, tetapi belum seluruhnya didokumentasikan dalam praktik usaha secara teknis (misalnya pencatatan, pelaporan zakat, atau kontrak syariah). Prinsip transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan, terutama pada pelaku usaha mikro dan informal.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Pengelolaan Harta

Beberapa faktor yang memengaruhi perilaku pengelolaan harta di antaranya adalah tingkat literasi keuangan syariah, lingkungan sosial keagamaan, modal spiritual (iman dan takwa), serta pengaruh dari komunitas dakwah atau tokoh agama. Sebagian besar pengusaha juga menyebutkan bahwa keberkahan dan niat ibadah menjadi motivasi utama dalam menjalankan usaha.

5. Konteks Lokal yang Kuat

Kota Banjarmasin sebagai kota dagang dengan basis keislaman yang kuat memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan umat. Namun, masih terdapat gap antara idealitas nilai syariah dan praktik aktual, yang menunjukkan pentingnya edukasi keuangan syariah dan pendampingan sistemik bagi pelaku usaha Muslim di daerah tersebut.

Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Islam telah mengakar secara normatif di kalangan pengusaha Muslim, masih dibutuhkan penguatan kelembagaan, edukasi keuangan Islami, serta fasilitasi kebijakan untuk membantu pelaku UMKM menerapkan prinsip pengelolaan harta yang sesuai syariah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan dan Program Tindak Lanjut

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis atas perilaku pengelolaan harta para pengusaha UMKM Muslim di Banjarmasin, maka berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan, lembaga keagamaan, dan pelaku kebijakan ekonomi syariah:

1. Penguatan Literasi Keuangan Syariah bagi UMKM

Pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan UMKM, bekerja sama dengan lembaga zakat, pesantren, dan akademisi, perlu menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan

syariah yang aplikatif dan kontekstual. Materi pelatihan dapat mencakup manajemen keuangan Islami, pencatatan harta, penghindaran riba, dan kewajiban zakat usaha.

2. Pendampingan dan Inkubasi Bisnis Syariah

Perlu dikembangkan program pendampingan usaha berbasis syariah secara berkelanjutan, khususnya bagi pelaku UMKM mikro dan tradisional. Program ini dapat dilakukan melalui sistem inkubasi usaha yang tidak hanya memperhatikan aspek profit, tetapi juga spiritualitas dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta.

3. Kolaborasi Lembaga Zakat dan UMKM untuk Zakat Produktif

Lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kota Banjarmasin dapat menjalin kemitraan strategis dengan pelaku UMKM Muslim untuk menyalurkan zakat dalam bentuk produktif (modal usaha, alat kerja, pelatihan). Pendekatan ini selain membantu penguatan usaha, juga meningkatkan kesadaran pengusaha sebagai muzakki yang bertanggung jawab.

4. Digitalisasi Keuangan dan Pencatatan Sederhana Berbasis Syariah

Diperlukan inovasi dalam bentuk aplikasi pencatatan keuangan sederhana berbasis syariah yang mudah digunakan oleh pengusaha kecil. Aplikasi ini dapat membantu pemisahan antara harta pribadi dan usaha, pencatatan zakat, serta perhitungan keuntungan yang sesuai dengan prinsip halal-thayyib.

5. Sosialisasi Nilai-Nilai Etika Ekonomi Islam melalui Dakwah Ekonomi

Lembaga dakwah lokal, masjid, dan majelis taklim perlu dilibatkan dalam penguatan dakwah ekonomi Islam, yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek aplikatif seperti etika bisnis, pengelolaan harta, dan tanggung jawab sosial. Hal ini penting untuk memperkuat motivasi spiritual pelaku usaha Muslim secara konsisten.

Penutup

Rekomendasi di atas bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Islam yang telah diyakini oleh pelaku usaha dan praktik teknis pengelolaan harta yang masih bersifat informal. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan komunitas dakwah, diharapkan terbentuk ekosistem ekonomi lokal yang berdaya saing, berkeadilan, dan penuh keberkahan

Daftar Pustaka

Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.

- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Fatimah, S. (2019). Persepsi Individu Muslim terhadap Manajemen Keuangan Islami di Kalangan Pekerja Urban. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 155–169.
- Hasanah, S., & Nurhayati, T. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pengelolaan Keuangan Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 89–101.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. London: IIIT.
- Kahf, Monzer. (1998). *Islamic Economic Institutions and the Mobilization of Resources*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Maulana, I., & Rahmah, A. (2021). Religiusitas dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan Syariah Individu Muslim. *Jurnal Iqtishaduna*, 8(1), 45–60.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nuraini, L. (2021). Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kinerja UMKM Berbasis Syariah di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Syariah*, 9(2), 77–89.
- Nurkholis. (2018). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal ZISWAF*, 6(2), 112–126.
- Rahman, M. (2022). Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengelola Pendapatan Rumah Tangga secara Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 123–134.
- Sari, M., & Rofiq, A. (2020). Manajemen Harta dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(1), 34–45